

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kondisi TPA Ngronggo pada tahun 2024-2025 menunjukkan bahwa keadaan TPA semakin kritis akibat dari adanya volume sampah melebihi kapasitas lahan yang tersedia. TPA Ngronggo seluas 5.4 ha, dengan sistem *controlled landfill* yang seharusnya diterapkan dalam pengelolaan TPA tidak berfungsi dengan optimal sehingga cenderung bergeser pada praktik *open dumping*. Kondisi ini menyebabkan terbentuknya gunung sampah hingga setinggi 15 meter yang menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat sekitar seperti pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran lingkungan yang mengganggu kehidupan sehari-hari masyarakat. Pemerintah daerah tidak memiliki infrastruktur yang cukup maupun operasional untuk dapat mengimbangi laju pertumbuhan volume sampah setiap harinya.

Kondisi TPA Ngronggo yang semakin mengkhawatirkan menyebabkan terjadinya konflik antara masyarakat dengan pemerintah. Wacana perluasan TPA Ngronggo yang dikeluarkan oleh pemerintah menuai penolakan dari masyarakat karena masyarakat merasa wacana tersebut sebagai ancaman. Dalam pandangan teori konflik Lewis. Coser, konflik yang terjadi di TPA Ngronggo merupakan konflik realistik karena berfokus pada ketidaksepahaman tujuan antara pemerintah dengan masyarakat. Masyarakat menolak wacana perluasan karena isu tersebut menyangkut dengan kenyamanan, kesehatan dan keselamatan hidup mereka kedepannya. Namun, dari sisi pemerintah perluasan menjadi kebutuhan karena daya tampung TPA yang terbatas akibat dari volume sampah yang semakin tinggi. Kedua

pihak memiliki keinginan dan pandangan yang berbeda dalam menyikapi hal ini. Pemerintah memerlukan lahan untuk keberlanjutan TPA Ngronggo, sedangkan masyarakat membutuhkan kualitas hidup yang layak.

Konflik dan ketegangan semakin meningkat karena masyarakat sekitar TPA Ngronggo merasa resah dengan bau menyengat yang mereka rasakan setiap hari dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Selain itu, kondisi diperparah dengan sampah yang tercecer dari truk pengangkut sampah, adanya janji-janji akan pemberian kompensasi dan ketidakkonsistenan jam operasional TPA menjadi faktor yang memperburuk konflik. Selain itu, faktor internal dari pemerintah dengan adanya keterbatasan anggaran, dan sumber daya manusia menyebabkan hambatan dalam penyelesaian penanganan TPA Ngronggo. Keresahan yang dirasakan selama bertahun-tahun memunculkan aksi yang dilakukan warga pada tanggal 31 Juli- 1 Agustus 2025 dengan melakukan penutupan akses jalan utama menuju TPA Ngronggo sehingga truk sampah tidak bisa masuk ke TPA. Tindakan ini menjadi aksi protes masyarakat atas dampak yang mereka rasakan dalam jangka waktu lama tanpa solusi yang konkret.

Konflik yang semakin memuncak pada akhirnya pemerintah melakukan beberapa upaya untuk menyelesaikan konflik. Negosiasi dilaksanakan setelah aksi penutupan jalan yang dilakukan oleh masyarakat. Hasil negosiasi pemerintah hanya menyanggupi untuk mengurangi bau dengan penyemprotan ecoenzim. Kemudian, dilaksanakan mediasi sebanyak satu kali dengan dibantu oleh DPRD Kota Salatiga. Hasil mediasi tidak jauh berbeda dengan hasil negosiasi dan tidak menyentuh akar permasalahan. Namun, pemerintah menyanggupi untuk mencari

dan merencanakan solusi untuk penanganan TPA Ngronggo yang mengalami *overload* kapasitas. Pemerintah merencanakan alternatif solusi yang disampaikan dalam proses mediasi yaitu dengan meningkatkan jumlah TPS3R, dan menggerakkan pembuatan biopori.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa konflik TPA Ngronggo terus berkembang karena kurangnya pendekatan antara pemerintah dengan masyarakat. Keresahan yang dirasakan warga berlangsung dalam jangka waktu yang lama menunjukkan bahwa penanganan tidak dilakukan dengan optimal. Tumpukan sampah yang tinggi menunjukkan bahwa penanganan sampah masih stagnan. Pemerintah perlu melakukan upaya untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan baik sehingga konflik tidak terus berlanjut. Penyelesaian konflik dengan masyarakat juga perlu dilakukan pemerintah dan membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif. Konflik dapat terselesaikan apabila pemerintah menggandeng masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai kondisi TPA Ngronggo pada tahun 2024-2025, dinamika konflik antara masyarakat dengan pemerintah, serta upaya penyelesaian konflik, maka pada bagian ini peneliti akan memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak. Adapun saran yang dapat diberikan Peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Salatiga

Saran yang ditujukan untuk Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Salatiga disusun berdasarkan temuan penelitian. Selain itu, instansi ini menjadi pemegang tanggung jawab utama dalam operasional dan pengelolaan TPA Ngronggo. Berikut saran yang ditujukan untuk Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Salatiga:

a. Melakukan Perbaikan Teknis dalam Pengelolaan TPA Secara Menyeluruh

Perbaikan teknis pada TPA Ngronggo merupakan kebutuhan utama dan mendesak untuk diperbaiki mengingat kondisi TPA yang *overload* telah menyebabkan berbagai dampak seperti pencemaran bau, air dan penyebaran penyakit karena tingginya populasi lalat. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Salatiga harus memperbaiki sistem drainase lindi agar tidak mencemari air sungai atau sumur warga, melakukan pentaan gundukan sampah serta memastikan melakukan penutupan sampah harian menggunakan tanah untuk mengurangi bau dan risiko penyakit. Upaya meminimalkan pencemaran akan menurunkan tensi konflik dengan masyarakat sekitar.

b. Melakukan Penambahan Alat Operasional Pengelolaan TPA dan Menambah Tenaga Kerja

Jumlah alat berat dan mesin yang minim hanya beberapa unit akan menghambat dalam penanganan volume sampah yang masuk ke TPA setiap hari. Keterbatasan alat berat membuat proses pemadatan sampah

berjalan lambat. Sehingga gundukan sampah semakin tinggi akan menciptakan kondisi rawan terjadi longsor ataupun pencemaran. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Salatiga perlu untuk menambah jumlah alat berat dan mesin agar pengelolaan sampah berjalan dengan optimal. Selain penambahan alat berat dan mesin, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Salatiga perlu untuk melakukan penambahan jumlah pekerja di TPA Ngronggo. Penambahan jumlah pekerja sangat penting dalam penanganan sampah TPA karena jumlah pekerja dengan volume sampah yang masuk tidakimbang. Dengan melakukan penambahan jumlah pekerja maka pengelolaan sampah akan lebih efektif dan efisien. Namun, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Salatiga perlu untuk melakukan pelatihan manajemen TPA sesuai standar sehingga dapat meningkatkan kompetensi pekerja.

c. Mengembangkan Program Pengurangan Sampah dari Hulu

Permasalahan overload tidak akan selesai jika volume sampah yang masuk ke TPA Ngronggo tidak dapat dikendalikan dan tetap di angka yang tinggi. Oleh karena itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Salatiga perlu melakukan langkah yang masif untuk menjalankan program pemilahan sampah mandiri di rumah, bank sampah, dan sosialisasi pembuatan lubang biopori di masing-masing rumah. Pengurangan sampah dari hulu akan meringankan beban TPA Ngronggo sehingga diharapkan pengelolaan sampah bisa dilakukan lebih optimal. Program pembuatan biopori, pemilahan sampah mandiri, sanksi untuk

masyarakat yang tidak mau mengolah sampahnya sendiri menjadi langkah yang perlu disosialisasikan dan digerakkan di kalangan masyarakat agar masyarakat memiliki kesadaran penuh untuk mengolah sampahnya sendiri seperti yang terjadi di Bali. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Salatiga bisa mengadaptasi dan mencontoh Bali dengan program biopori, hanya mengangkut sampah yang tidak bisa diolah dan sanksi yang tegas kepada masyarakat jika tidak mengolah sampahnya sendiri. Sehingga masyarakat memiliki kesadaran untuk mengolah sampahnya sendiri. Program ini berhasil menurunkan volume sampah yang masuk ke TPA.

d. Mengembangkan Rencana Jangka Panjang Pengelolaan Sampah dengan Sistem Modern

Sistem *landfill* tidak lagi relevan untuk kota yang terus mengalami perkembangan misalnya pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Sehingga, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Salatiga perlu mengkaji teknologi seperti *Waste to Energy* (WtE) atau *Refuse Derived Fuel* (RDF). *Waste to Energy* (WtE) adalah teknologi pengolahan sampah yang mengubah limbah yang tidak dapat di daur ulang menjadi bentuk energi yang berguna seperti panas, uap, listrik atau bahan bakar (biogas dan biodiesel). Dalam beberapa tahun terakhir, *Waste to Energy* (WtE) menjadi solusi yang efektif bagi pemerintah untuk mengurangi permasalahan pada pembuangan akhir sampah dan mampu menyediakan pasokan energi terbarukan yang berkelanjutan (Setyono &

Sinaga, 2021). Namun, teknologi ini memerlukan biaya yang tinggi. *Refuse Derived Fuel* (RDF) merupakan alternatif untuk mengolah sampah yang tidak dapat di daur ulang dengan proses penghancuran dan pengeringan (Maulidayanti dkk., 2024). Proses RDF menghasilkan bentuk energi yang berguna seperti listrik, uap, panas atau bahan bakar (biogas dan biodiesel). Sehingga, dapat menggantikan batu bara dan bahan bakar di industri pabrik semen dan pembangkit listrik. Penggunaan teknologi modern dapat menjadi strategi jangka panjang untuk kota agar tidak terus-menerus menghadapi krisis sampah di TPA.

e. Membangun Komunikasi dan Monitoring Secara Berkala

Membangun komunikasi dan dialog secara berkala antara pemerintah dengan masyarakat sangat diperlukan karena dialog yang terjalin dengan baik maka akan meminimalkan terjadinya kesalahpahaman antara kedua pihak. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Salatiga perlu untuk melaksanakan dialog terbuka dengan masyarakat secara berkala misalnya 1 bulan sekali. Hal ini akan memberikan kesempatan bagi masyarakat menyampaikan aspirasi dan keresahan mereka. Disisi lain, pemerintah juga bisa menyampaikan rencana-rencana kedepan terakit dengan penanganan sampah di TPA. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Salatiga juga harus melakukan monitoring dan evaluasi penanganan sampah di TPA secara berkala. Hal ini diharapkan dapat melihat perkembangan perbaikan penanganan sampah di TPA Ngronggo. Hasil monitoring yang dilakukan juga harus

disampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi dari pemerintah.

2. DPRD Kota Salatiga

Saran untuk DPRD Kota Salatiga disusun dengan memperhatikan peran strategis yang dimiliki lembaga legislatif dalam pengawasan, penganggaran dan legislasi daerah. Berikut saran yang disusun untuk DPRD Kota Salatiga:

a. Mengoptimalkan Fungsi Pengawasan Terhadap Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam Menangani Masalah TPA Ngronggo

Selama ini pengawasan DPRD terhadap operasional TPA belum dilaksanakan secara maksimal, sehingga permasalahan masih terus muncul tanpa adanya evaluasi yang mendalam. DPRD Kota Salatiga perlu mengawasi kinerja dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Salatiga, khususnya terkait dengan penanganan sampah dan pencemaran lingkungan. Pengawasan yang dilakukan dengan rutin membantu untuk memastikan bahwa Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Salatiga telah bekerja sesuai dengan standar, aturan dan tidak mengabaikan keluhan masyarakat. DPRD Kota Salatiga juga perlu melakukan pengawasan terhadap rencana alternatif yang akan dijalankan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Salatiga agar dilaksanakan dengan maksimal. Peran pengawasan ini sangat penting agar kualitas lingkungan dapat terjaga dengan baik.

b. Menuntut Kajian Ilmiah Terkait dengan Rencana Perluasan TPA Ngronggo

Perluasan TPA Ngronggo menjadi kebutuhan bagi pemerintah untuk memperpanjang umur TPA. Namun, perluasan TPA juga memiliki dampak besar bagi lingkungan dan masyarakat sekitar sehingga DPRD Kota Salatiga perlu memastikan bahwa keputusan yang diambil berbasis pada kajian ilmiah yang lengkap. Kajian seperti AMDAL, kajian sosial, kajian lingkungan dan analisis kesehatan harus ditinjau dengan serius sebelum disetujui. DPRD Kota Salatiga tidak boleh hanya menerima penjelasan dari eksekutif saja tanpa adanya data yang valid. Selain itu, dalam mengambil keputusan akan perluasan, pemerintah perlu mengkomunikasikan kepada masyarakat karena masyarakat yang hidup berdampingan dengan TPA Ngronggo. Kajian ilmiah yang dilakukan akan menghasilkan keputusan yang objektif dan mencegah kebijakan yang merugikan masyarakat sehingga dapat menurunkan potensi konflik muncul kembali.

c. Memperkuat Partisipasi Publik dalam Perencanaan TPA

Keputusan yang berkaitan dengan keberlanjutan TPA Ngronggo akan sangat mempengaruhi kehidupan warga sekitar TPA, sehingga masyarakat berhak untuk dilibatkan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan melalui forum dialog atau *public hearing*. DPRD Kota Salatiga dapat mendorong dan membersamai Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Salatiga dalam melakukan forum dialog

dengan masyarakat. Ruang aspirasi diperlukan sehingga masyarakat dapat menyampaikan pendapat, keluhan, keberatan dan saran kepada pemerintah. Forum dialog yang dilakukan juga akan mengurangi terjadinya kesalahpahaman dan membantu meningkatkan legitimasi keputusan yang diambil. Partisipasi publik yang kuat, akan mencegah konflik muncul terus-menerus karena keputusan yang diambil dianggap adil dan transparan.

d. Mengalokasikan Anggaran untuk Penanganan Permasalahan Sampah

Penanganan sampah di TPA Ngronggo memerlukan anggaran yang besar karena membutuhkan pembaruan alat, mesin, penambahan pekerja dan pengolahan sampah. Sehingga DPRD Kota Salatiga harus memastikan bahwa alokasi dana mencukupi untuk kebutuhan peningkatan infrastruktur TPA. Apabila anggaran yang dimiliki memadai, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Salatiga dapat memaksimalkan penanganan TPA dan menangani *overload* yang terjadi. DPRD Kota Salatiga memiliki peran penting untuk memastikan bahwa anggaran lingkungan tidak dikurangi atau dialihkan kepada sektor lain karena penanganan permasalahan sampah menjadi hal yang mendesak untuk dilakukan.

3. Peneliti Selanjutnya

Mempertimbangkan bahwa permasalahan TPA Ngronggo menjadi isu yang berkelanjutan, maka diperlukan penelitian lain untuk memperdalam dari berbagai perspektif. Berikut saran yang disusun untuk peneliti selanjutnya:

a. Melakukan Penelitian Efektivitas Pengurangan Sampah dari Hulu

Penelitian selanjutnya dapat mengetahui efektivitas dari penanganan sampah di ulu dengan melihat apakah program biopori, pemilahan sampah mandiri, pembangunan TPS3R dan bank sampah benar-benar berhasil dilakukan dan menurunkan volume sampah yang masuk ke TPA. Temuan dari penelitian ini akan membantu pemerintah dalam memperbaiki strategi pengurangan sampah. Jika temuan yang didapatkan program ini tidak berjalan dengan baik dan tidak efektif, maka perlu dilakukan evaluasi ulang.

b. Melakukan Studi Perbandingan Daerah Lain yang Telah Berhasil Mengurangi Volume Sampah TPA

Perbandingan penanganan sampah di TPA Ngronggo dengan TPA lain dapat menemukan pola kebijakan yang efektif dan relevan. Perbandingan ini akan menambah wawasan baru mengenai model penanganan sampah yang telah berhasil diterapkan di daerah lain. Hal ini akan membantu Kota Salatiga dalam melakukan perbaikan terhadap penanganan sampah di TPA Ngronggo. Studi komparatif akan memperkaya referensi dan rekomendasi solusi terbaik.

**c. Mengeksplorasi Potensi Penggunaan Teknologi Modern
Pengolahan Sampah sebagai Alternatif Solusi**

Peneliti dapat melakukan kajian kelayakan teknologi modern dalam pengolahan sampah seperti *Waste to Energy* (WtE) dan *Refuse Derived Fuel* (RDF) untuk diterapkan di Kota Salatiga guna mengurangi volume sampah yang tinggi. Analisis tersebut membantu pemerintah dalam memilih teknologi yang sesuai dan paling sedikit menimbulkan dampak lingkungan. Teknologi modern dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan terhadap TPA.